

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) PANSUS RUU TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) DENGAN REAL ESTATE INDONESIA (REI), PERUSAHAAN UMUM PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS), DAN BADAN WAKAF NASIONAL

Tahun Sidang : 2015-2016

Masa Persidangan : II

Rapat ke : 2 (dua) Sifat : Terbuka

Hari/Ttanggal : Rabu, 18 November 2015 P u k u l : 14.00 s.d 17.00 WIB Tempat : Ruang Rapat KK I

Gedung Nusantara

Acara Rapat : Mencari masukan terkait pembahasan RUU tentang

Tapera

Ketua Rapat : Drs. H. Saiful Rasyid, MM.

Sekretaris : Dra. Nurani Bodroini H a d i r : 7 dari 30 Anggota

Pemerintah : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat RI

I. PENDAHULUAN

Setelah Anggota menandatangani daftar hadir Pansus, maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menyampaikan pengantar rapat serta menjelaskan agenda RDPU pada hari/tanggal tersebut dan menyatakan rapat terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan pihak Real Estate Indonesia (REI), Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas), dan Badan Wakaf Nasional untuk memberikan masukan terkait dengan Draft RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Setelah pihak yang diundang menyampaikan masukan-masukan terkait dengan RUU Tapera, maka Ketua Rapat merangkum hasil masukan tersebut.

II. Masukan dari Real Estate Indonesia (RE), Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas), dan Badan Wakaf Nasional terhadap RUU tentang Tapera adalah sebagai berikut:

- 1. Dana Tapera merupakan dana yang berasal dari masyarakat maka sebaiknya digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan rakyat,
- 2. Terkait dengan pemupukan dana Tapera diusulkan tidak menggunakan proporsi tetapi merupakan sisa setelah semua kebutuhan rumah peserta terpenuhi.
- 3. Tidak setuju dengan adanya manajer investasi karena berpotensi membuat dana murah menjadi mahal.

- 4. Perlu menghindari konversi dana murah menjadi mahal sehingga besaran pemupukan dan pengelolaan dana perlu diatur dengan Peraturan Menteri terkait.
- 5. Metode dalam RUU yang bisa menggunakan konvesional dan syariah berpotensi menyebabkan perbedaan yield, dan menimbulkan kebingungan. Misalnya, jika peserta yang pada awalnya menggunakan syariah tiba-tiba ingin berubah ke konvesional, dalam RUU belum ada mekanisme yang mengatur.
- 6. Mengingat dana besar yang dikelola, maka Badan pengelola Tapera perlu menggunakan Good Corporate Governance, sanksi juga perlu diadakan bagi pengelola sehingga dapat bekerja secara professional, terbuka, dan akuntabel.
- 7. Perlu diatur dan dipertimbangkan beban yang ditanggung peserta dalam hal mengangsur KPR dan membayar iuran.
- 8. Peserta yang mendapatkan manfaat fasilitas harus memenuhi syarat dan seleksi BP Tapera, sementara peserta yang tidak lulus seleksi mendapat beban karena hanya bisa mengambil dana ketika pensiun atau usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- 9. Peserta yang tidak memenuhi syarat mendapatkan fasilitas sebaiknya diperbolehkan untuk mengambil dananya sebelum pensiun (pada periode tertentu), misalnya untuk perbaikan rumah.
- 10. Persentase pengelolaan sudah diatur dalam RUU, sebaiknya diatur oleh BP Tapera.

II. Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

a.n. Ketua Rapat

ra. Nurani Bodroini 19 19600703198803200



DAFTAR HADIR

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) PANSUS RUU TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) DENGAN REAL ESTATE INDONESIA (REI), PERUSAHAAN UMUM PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS), DAN BADAN WAKAF NASIONAL HARI/TANGGAL: RABU, 18 NOVEMBER 2015

NO URUT	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI	JABATAN	KET.
1.	Drs. Yoseph Umarhadi, M.Si.,MA.	162	F-PDIP	Ketua	
2.	H. Mukhamad Misbakhun, SE.	283	F-PG	Wakil Ketua	Hadir
3.	Drs. H. Saiful Rasyid, MM.	384	F-P. Gerindra	Wakil Ketua	Hadir
4.	Bertu Merlas, ST.	41	F-PKB	Wakil Ketua	Hadir
5.	Sadarestuwati	201	F-PDIP	Anggota	
6.	Arteria Dahlan, ST., SH.	197	F-PDIP	Anggota	ljin
7.	Agustina Wilujeng Pramestutui, SS.	174	F-PDIP	Anggota	
8.	H. Indra P. Simatupang, SE., MBA.	157	F-PDIP	Anggota	
9.	Ir. Ketut Sustiawan	150	F-PDIP	Anggota	Hadir
10.	H. Budi Supriyanto, SH., MH.	280	F-PG	Anggota	
11.	H. Andika Hazrumy, S.Sos.	293	F-PG	Anggota	
12.	dr. Charles Jones Mesang	301	F-PG	Anggota	Hadir
13.	H. Hasnuryadi Sulaiman	306	F-PG	Anggota	
14.	H. Willgo Zainar, SE., MBA.	379	F-P. Gerindra	Anggota	
15.	Tgk. Khaidir	325	F-P. Gerindra	Anggota	Hadir
16.	H. Subarna, SE., M.Si.	352	F-P. Gerindra	Anggota	
17.	Michael Wattimena, SE., MM.	457	F-PD	Anggota	ljin
18.	Anton Sukartono Suratto	417	F-PD	Anggota	,
19.	Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si.	452	F-PD	Anggota	

NO		NO.			
URUT	NAMA	ANGGOTA	FRAKSI	JABATAN	KET.
20.	H. Yandri Susanto, S.Pt.	494	F-PAN	Anggota	
21.	H.A. Bakri HM, SE.	464	F-PAN	Anggota	
22.	H. Nasril Bahar, SE.	461	F-PAN	Anggota	
23.	Drs. H. Musa Zainuddin	42	F-PKB	Anggota	
24.	Ir. H. Sigit Sosiantomo	114	F-PKS	Anggota	Hadir
25.	Dr. Hermanto, SE., MM.	88	F-PKS	Anggota	ljin
26.	Drs. H. Hasrul Azwar, MM.	507	F-PPP	Anggota	ljin
27.	H. Epyardi Asda, M.Mar.	509	F-PPP	Anggota	
28.	H. Syarif Abdullah Alkadrie	13	F-P. Nasdem	Anggota	
29.	Ahmad H.M. Ali, SE.	32	F-P. Nasdem	Anggota	
30.	Fauzih H. Amro, M.Si.	548	F-P. Hanura	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN				
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI						
1.	Maurin Sitorus	PUPR				
2.	Hendi Hendarmin	Kasie PL				
3.	Baby S Pipokusumo	Dir. PSPP				
4.	Adang Sutara	PUPR				
5.	Ariastuti	Kasie Taperum				
6.	Wiwin N	Staf				
	REAL ESTATE INDONESIA (REI)					
1.	Eddy Hussy	Ketua REI				
2.	Hari Raharja S	Sekjen DPP REI				
3.	Dadang Juhro	Waketum RST				
4.	Andrian Sudjana	Wasekjen				
5.	Lily Melany	BPOD				
PERUSAHAAN UMUM PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS)						
1.	Himawan Arief Sugoto	Dirut				
2.	M. Nawir	Dir. Pemasaran				
	BADAN WAKAF NASIONAL					
1.		Direktur Eksekutif				

a.n. Ketua Rapat Sekretaris,

Dra. Nurani Bodroini N/P. 196007031988032001